

## TAJUK RENCANA

### Dorong OJK Intensif Awasi Pinjol

PINJAMAN online (pinjol) ilegal masih menjadi perbincangan hangat masyarakat menyusul digerebeknya kantor aplikasi pinjol di Padukuhan Samirano, Caturtunggal Depok Sleman beberapa hari lalu. Pinjol ilegal sangat meresahkan masyarakat, sehingga memang harus diambil tindakan tegas terhadap penyelenggaraannya.

Bahkan, Presiden Jokowi memberi perhatian khusus terhadap keberadaan pinjol ilegal. Pemerintah saat ini sedang membahas strategi jitu untuk memberantas pinjol ilegal. Sedangkan menyangkut izin operasional pinjol resmi juga akan dibatasi. Akan ada moratorium terkait pendirian pinjol.

Tak dipungkiri pinjol adalah fenomena kehidupan ekonomi masyarakat yang memang dibutuhkan. Data dari Kominfo menyebut, 68 juta warga Indonesia melakukan transaksi pinjol, sedang dana yang berputar mencapai Rp 260 triliun, tentu ini jumlah yang sangat besar.

Sementara pinjol resmi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai 107 pinjol. Di luar jumlah tersebut, dipastikan tidak resmi alias ilegal yang notabene jumlahnya jauh lebih banyak. Inilah yang kini jadi agenda pemerintah untuk ditindak dan ditertibkan.

Penggerebekan kantor aplikasi pinjol di Sleman yang dilakukan jajaran Polda Jabar dan Polda DIY dilakukan beberapa hari setelah Presiden memerintahkan agar pinjol ilegal dibebaskan karena menyusahkannya masyarakat. Instruksi itu kemudian ditindaklanjuti Kapolri yang langsung memerintahkan seluruh Kapolda di Indonesia untuk memberantas pinjol ilegal.

Pertanyaannya, mengapa pinjol ilegal bisa beroperasi di DIY? Apakah aparat kecolongan? Melihat modulusnya, mereka sangat cerdas, yakni berlindung di balik pinjol legal. Mencermati kasus di Sleman, pelaku hanya menggunakan 1 aplikasi pinjol resmi yang terdaftar di OJK, sedang 23 pinjol lainnya ilegal. Ketika bertransaksi dengan masyarakat, seolah-olah pinjol legal.

Belajar dari kasus tersebut, kita mendorong agar OJK maupun aparat terkait untuk lebih intens melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ada di masyarakat. Kita menduga, penyelenggara aplikasi pinjol ilegal sengaja mengelabui aparat, sehingga ketika dirazia mereka bisa menunjukkan izin resmi, padahal di balik itu mereka melakukan praktik pinjol ilegal.

Kasus pinjol ilegal terbongkar setelah ada laporan korban yang dipelakikan secara tidak manusiawi oleh debt collector. Umumnya nasabah tidak mampu melunasi utangnya karena bunganya sangat tinggi dan tidak wajar, atau lebih dikenal bunga berbunga. Dalam kondisi tersebut posisi nasabah sangat lemah karena terus dipaksa dan diancam dengan kekerasan oleh debt collector. Bahkan, teman-teman nasabah ikut kena teror.

Sayangnya, tidak semua korban pinjol melapor ke aparat penegak hukum. Dalam konteks itulah selain kita mendorong OJK intens melakukan pengawasan, juga mendorong kesadaran masyarakat untuk melapor ketika menjadi korban pinjol ilegal. Pinjol ilegal memang harus dibebaskan dan untuk melakukannya butuh komitmen dan kesadaran bersama. Kita tak ingin lagi ada kasus-kasus pinjol ilegal seperti terjadi di Sleman.

Pinjol ilegal terbongkar setelah ada laporan korban yang dipelakikan secara tidak manusiawi oleh debt collector. Umumnya nasabah tidak mampu melunasi utangnya karena bunganya sangat tinggi dan tidak wajar, atau lebih dikenal bunga berbunga. Dalam kondisi tersebut posisi nasabah sangat lemah karena terus dipaksa dan diancam dengan kekerasan oleh debt collector. Bahkan, teman-teman nasabah ikut kena teror.

Sayangnya, tidak semua korban pinjol melapor ke aparat penegak hukum. Dalam konteks itulah selain kita mendorong OJK intens melakukan pengawasan, juga mendorong kesadaran masyarakat untuk melapor ketika menjadi korban pinjol ilegal. Pinjol ilegal memang harus dibebaskan dan untuk melakukannya butuh komitmen dan kesadaran bersama. Kita tak ingin lagi ada kasus-kasus pinjol ilegal seperti terjadi di Sleman.

## Peta Mangrove Nasional 2021

PEMERINTAH meluncurkan Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 di Jakarta, Rabu, (13/10). Penyusunan PMN 2021 telah diawali sejak 2016 dan merupakan penyempurnaan edisi terdahulu. PMN 2021 merupakan peta tematik dengan skala 1:150.000 sehingga diharapkan dapat memberikan data geospasial yang lebih akurat dan akurat.

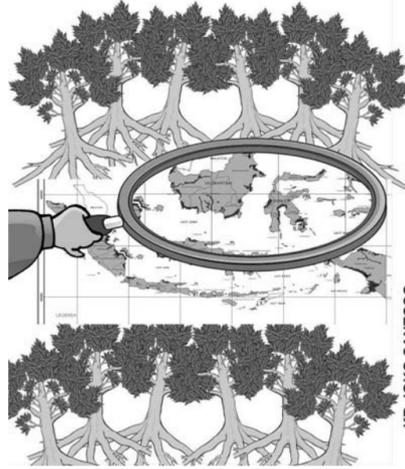
Proses pembuatan PMN 2021 melibatkan berbagai institusi antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tergabung dalam Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove. Kerja bareng ini mencerminkan semangat menjaga mangrove Indonesia oleh berbagai sektor, agar tetap lestari dan berkelanjutan.

PMN 2021 akan menjadi acuan dasar bagi para pihak yang terlibat dengan pengelolaan mangrove di Indonesia. Di sisi lain PMN 2021 juga mendukung rencana rehabilitasi mangrove di 34 provinsi di Indonesia yang telah dicanangkan pemerintah. Namun, apakah manfaat PMN 2021 bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove?

### Boy Rahardjo Sidharta

mangrove saat ini menunjukkan nilai ekonomi yang penting. Luasan kawasan mangrove juga bermakna strategis dalam melakukan program penajagaan, pelestarian, dan peningkatan keberadaannya.

Meskipun PMN 2021 saat ini menjadi peta rujukan utama pengelolaan mangrove, namun tampaknya masih perlu disempurnakan, karena skalanya 'hanya' 1:150.000. Target kebijakan satu peta yaitu menghasilkan peta dengan skala



KR-JOKO SANTOSO

1:50.000 sehingga lebih rinci dan lebih operasional. Keberadaan peta yang lebih rinci dan operasional tentu semakin mempermudah para pihak dalam melakukan berbagai kegiatan di kawasan mangrove di Indonesia.

**Persemaian Mangrove**  
Kondisi mangrove di beberapa wilayah Indonesia sudah sangat memerlukan rehabilitasi. Pemerintah menargetkan kawasan rehabilitasi mangrove seluas 483.000 hektare yang akan digarap pada tahun 2021-2024 di sembilan provinsi. Yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.

Kawasan penunjang rehabilitasi yaitu tersedianya lahan-lahan persemaian mangrove. Bila tidak didata dan disiapkan dengan baik, kegiatan rehabilitasi tidak berjalan dengan sukses. Sangat diharapkan PMN 2021 dapat memberikan data penunjang berupa kawasan yang potensial dijadikan pusat kegiatan persemaian, khususnya lahan yang memenuhi persyaratan secara biofisikokimia untuk menumbuhkan bibit mangrove. Selain perlu ditambahkan pula data sosial-ekonomi-budaya, tetapi mungkin tidak dapat 'dimasukkan' dalam PMN 2021.

PMN 2021 memberikan secerah harapan bagi kawasan mangrove di Indonesia yang semakin menghadapi banyak ancaman. Pembukaan dan pengalihan penggunaan kawasan mangrove menjadi fungsi lain sangat masif saat ini. PMN 2021 yang masih terus disempurnakan seyogyanya dapat memberikan data *real time* semacam itu. Sehingga semakin sesuai dengan tujuan pokok kebijakan satu peta.

Semoga PMN 2021 tidak hanya bagus di atas kertas. Namun juga mampu memberikan masalah bagi banyak pihak, khususnya masyarakat di sekitar kawasan mangrove yang harus semakin berdaya dan sejahtera.\*\*\*

*\* Boy Rahardjo Sidharta, pendidik di Fakultas Teknobiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Koordinator Diklat Ihtan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) Komda Yogyakarta*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : [opinikr@gmail.com](mailto:opinikr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
[pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com) 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Lestarkan Budaya

BANYAK sektor terdampak pandemi Covid-19, baik ekonomi, pendidikan, sosial, industri, pariwisata, politik, budaya, transportasi, dan lainnya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Namun setelah hampir dua tahun kita hidup di tengah pandemi, masyarakat mulai mencoba untuk terbiasa dengan kondisi tersebut. Hal ini merupakan momen untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tetap berkegiatan dan mengembangkan diri dengan perubahan perilaku, yaitu mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas.

Di saat pandemi Covid-19, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY terus berusaha untuk melestarikan budaya lokal dalam bentuk pertunjukan seni budaya yang ditayangkan melalui kanal YouTube Dinas Kebudayaan DIY: *tasteofogja disbud diy*.

Banyak seniman dan desa budaya ikut serta dalam menyemarakkan kegiatan tersebut sekaligus mengenalkan budaya pada masyarakat. Berbagai kegiatan yang ditampilkan yaitu pementasan cerita daerah, tembang Jawa, tari, teater, musik, dan lainnya. Sajian dan tampilan yang beragam mampu memberikan tontonan serta tuntunan bagi masyarakat penikmat budaya.

Kegiatan yang disiarkan secara

daring ini selalu meriah, diminati oleh masyarakat. Meskipun disiarkan secara daring, acara tersebut tetap diminati oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penonton setiap tayangan *live* di YouTube berlangsung. Dengan banyaknya penonton, bisa diartikan masih banyak warga masyarakat yang senang dengan budaya tradisional.

Acara tersebut bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan antarpelajar, mahasiswa, masyarakat dengan penguatan keberagaman budaya dan kearifan lokal. Untuk itu, tentunya Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan DIY akan terus berkomitmen dan menampilkan kebudayaan dengan menggendong banyak seniman dan budayawan, pelajar serta seluruh pecinta budaya untuk selalu memelihara dan mengembangkan budaya di masa sekarang.

Diharapkan, rangkaian kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan sebagai ruang ekspresif dan edukatif bagi masyarakat agar muncul generasi muda yang memiliki minat dan bakat untuk dikembangkan sesuai dengan keahliannya. Dengan adanya motivasi baru, keyakinan baru, niat yang baik, segala kegiatan yang positif akan selalu berjalan dengan baik dan lancar.

*\* Faranisa Fauziana, Mahasiswa PBSI FKIP UAD Yogya.*

## Jokowi Jangan Terlenua Pujian

PRESIDEN Joko Widodo mendapat pujian selangit dari Kishore Mahbubani. Artikelnya berjudul *The Genius of Jokowi* dimuat di *Project Syndicate* (6/10) lalu. Kishore membuka artikelnya dengan ketika banyak negara demokrasi kaya memilih penipu (*con men*) sebagai pemimpin politiknya, kesuksesan Presiden Indonesia Joko Widodo layak diberi apresiasi. Jokowi memberi contoh model pemerintahan yang baik untuk kita pelajari. Negara demokrasi kaya yang dirujuk Kishore adalah Inggris dan Amerika Serikat.

Kishore membandingkan Jokowi dan Joe Biden. Jokowi bisa menjembatani perpecahan politik yang terjadi di Indonesia pascapemilu, sedangkan Joe Biden tidak bisa. Kegagalan Joe Biden, menurut Kishore, adalah sebanyak 78% kaum Republikan tidak menganggap Biden adalah Presiden AS terpilih.

**Konsolidasi Politik**  
Sejak periode pertama, kemampuan melakukan konsolidasi politik tingkat elite sudah menjadi andalan Jokowi. Tidakkah mengagetkan jika Jokowi periode kedua juga melakukan langkah catur demikian. Keinginan Jokowi untuk membentuk koalisi pemerintahan yang stabil sebenarnya sudah terlihat ketika berpikato mengenai omnibus law pada Sidang MPR 16 Agustus 2019. Jokowi seakan sudah tahu bahwa omnibus law akan menghadapi banyak tentangan. Untuk memuluskan rencananya, Jokowi merangkul Gerindra, partai pendukung calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno.

Saya ingin menganalisis hubungan antara pujian Kishore dan taktik merangkul Jokowi ini. Pertama, dengan merangkul Prabowo dan Gerindra, kekuatan partai pendukung Jokowi di parlemen sangat kuat. Sudah lebih dari 70%. Jumlah yang lebih dari cukup untuk menggolkan omnibus law ini. Kenyataannya, omnibus

### Lukmono Suryo Nagoro

law sudah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

Namun, taktik merangkul ini sebenarnya taktik bertahan. Dengan perbandingan kekuatan 70% - 30%, pertahanan Jokowi menjadi sangat kuat untuk menghadapi *jab, hook* dan *uppercut* dari kelompok di luar koalisinya. Di sisi lain, taktik merangkul ini sebenarnya membuat arena demokrasi yang biasanya kaya akan gagasan menjadi sepi.

Kedua, ada persamaan antara Indonesia dan Singapura dalam derajat kedemokratisannya. Kedua negara ini berada di level *flawed democracy* atau demokrasi yang cacat. Hal demikian secara tidak langsung juga memengaruhi cara berpikir Kishore Mahbubani. Di Singapura juga tidak dikenal partai oposisi. Beda tipis dengan Indonesia. Oposisi, hanya merupakan koalisi di luar pemerintah yang juga menunggu kesempatan bergabung.

Pribadi Jokowi sendiri merupakan gabungan dari populis, teknokratis, dan pragmatis. Mari kita buktikan: untuk mengoyakkan omnibus law, butuh mayoritas parlemen. Salah satu partai besar yang sama-sama nasionalis tetapi belum masuk koalisi adalah Gerindra. Akhirnya, omnibus law disahkan tanpa gejala berarti di parlemen.

**Populis**  
Pribadi lainnya adalah populis. Jokowi sangat pro-rakyat. Jokowi tidak punya definisi yang filosofis mengenai demokrasi dan korupsi yang hampir tidak pernah muncul lagi dalam pidato kenegaraannya dua tahun belakangan ini. Demokrasi bagi Jokowi hanya bermanfaat jika menyejahterakan rakyat. Kebe-

basan yang dirasa kebablasan dan dianggap gangguan bagi stabilitas pemerintahan akan 'dikurangi'.

Pemberantasan korupsi juga dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemberantasan korupsi masa Jokowi lebih berkaitan dengan mengurangi ekonomi biaya tinggi agar rakyat mudah berbisnis dan investasi masuk ke Indonesia. Sehingga ada pembukaan lapangan pekerjaan.

Negara Indonesia kini sedang mengalami kemunduran di bidang demokrasi dan pemberantasan korupsi. Jokowi diharapkan memasukkan kembali soal demokrasi dan pemberantasan korupsi, setidaknya di teks pidato kenegaraannya. Agar agenda-agenda kesejahteraan bisa berjalan dengan baik alias minim resistensi rakyat. Jika hal itu bisa berjalan baik, Jokowi tidak perlu repot-repot meminta overtone alias tiga periode.

*\* Lukmono Suryo Nagoro, editor buku dan tinggal di Solo*

## Pojok KR

UMKM DIY kelola produk harus profesional.  
-- Pemasaran secara digital jadi tuntutan.  
\*\*\*  
Menangani Covid-19 akan efektif bila kolaboratif.  
-- Penting lagi, menjaga kedisiplinan dan komitmen.  
\*\*\*  
Investor saham di Indonesia didominasi generasi muda.  
-- Generasi tua cukup mengawasi.

*Berabe*

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.  
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).  
Penerbit: Drs HM Idham Samawi. Komisar: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Bakoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan  
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). Alamat e-mail: [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). Radio : KR Radio 107.2 FM.  
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.  
Perwakilan dan Biro:  
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.  
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.  
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.  
Banjumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.  
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.  
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.  
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.  
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

### Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwati, Dra Prabadari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.  
Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)  
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrk23@yahoo.com](mailto:iklankrk23@yahoo.com), [iklankrk13@gmail.com](mailto:iklankrk13@gmail.com).  
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%